

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	28
1.3. Tujuan Penelitian.....	28
1.4. Manfaat Penelitian.....	29
1.4.1. Manfaat Teoritis	29
1.4.2. Manfaat Praktis	29
1.5. Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	30
1.6. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
2.1. Landasan Teori	36
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....	37
2.1.2. Teori Pemidanaan.....	44
2.1.3. Teori Keadilan Bermartabat.....	46
2.2. Landasan Konseptual.....	50
2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	52
2.2.2. Diversi	55
2.2.3. Konsep Restorative Justice	68
2.2.4. Kebijakan Hukum Pidana	78
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	87
3.1. Jenis Penelitian	88
3.2. Pendekatan Penelitian.....	91
3.3. Teknik Pengumpulan Data	92
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	93
3.4. Sumber Data Penelitian	94
3.5. Teknik Analisis Data	97
3.6. Sistematika Penulisan.....	98

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	100
4.1. Pengaturan Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	100
4.1.1. Analisis Perundang-undangan Nasional terkait Peradilan Pidana Anak di Indonesia	100
4.1.1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	100
4.1.1.2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	102
4.1.1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.....	105
4.1.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.....	107
4.1.1.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	111
4.1.1.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	114
4.1.1.7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.....	117
4.1.1.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	120
4.1.1.9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	141
4.1.2. Analisis Instrumen Hukum Internasional terkait Peradilan Pidana Anak	149
4.1.2.1. The United Nations Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan) Resolusi 663 C 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 13 Mei 1977	151
4.1.2.2. The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak) atau The Beijing Rules Resolusi 40/33 29 November 1985 ..	157
4.1.2.3. Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) Resolusi 44/25 20 November 1989	163
4.1.2.4. The United Standard Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures “The Tokyo Rules”(Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tindakan Non-Penahanan) Resolusi 45/110 14 Desember 1990.....	170

4.1.2.5. <i>The United Nations Guidelins for the Preventive of Juvenile Delinquency, "The Riyadh Guidelines"</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pencegahan Kenakalan Remaja) Resolusi 45/112 14 Desember 1990.....	174
4.1.2.6. <i>The United Nations Rules for the Protection of Juvenile of Liberty</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Perlindungan Remaja yang Terampas Kebebasannya) Resolusi 45/113 14 Desember 1990.....	195
4.1.2.7. Analisis Intrumen Internasional terkait Sistem Peradilan Pidana Anak	207
4.1.2.8. Analisis <i>UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i> (Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Tahanan) Resolusi 663 C 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 13 Mei 1977 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	208
4.1.2.9. Analisis <i>The United Nations Standard Minimum Rules for The Administrations of Juvenile Justice</i> (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenal Pelaksanaan Peradilan bagi Anak) atau <i>The Beijing Rules</i> Resolusi 40/33 29 November 1985 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	213
4.1.2.10..... Analisis <i>Convention on The Rights of The Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Resolusi 44/25 20 November 1989 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	218
4.1.2.11.... Analisis <i>The United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures "The Tokyo Rules"</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tindakan Non-Penahanan) Resolusi 45/110 14 Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	224
4.1.2.12..... Analisis <i>The United Nations Guidelins for the Preventive of Delinquency "Riyadh Guidelines"</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Pencegahan Tindak Pidana Remaja) Resolusi 45/112 Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	227
4.1.2.13... Analisis <i>The United Nations Rules for the Protection of Juvenile of Liberty</i> (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya) Resolusi 45/113 14 Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	231
4.1.3. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif.....	234
4.1.3.1. Domestic Law.....	234

4.1.3.2. International Law.....	239
4.2. Implementasi Pengaturan Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	247
4.2.1. Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.....	247
4.2.1.1. Kendala Tingkat Kepolisian Polresta Bareleng.....	256
4.2.1.2. Kendala Tingkat Kejaksaan Negeri Batam	260
4.2.1.3. Kendala Tingkat Pengadilan Negeri Batam	264
4.2.2. Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di Maros Provinsi Sulawesi Selatan	270
4.2.2.1. Kendala Tingkat Kepolisian Polres Maros.....	272
4.2.2.2. Kendala Tingkat Kejaksaan Negeri Maros.....	281
4.2.2.3. Kendala Tingkat Pengadilan Negeri Maros.....	286
4.2.3. Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Di Temanggung Provinsi Jawa Tengah.....	301
4.2.3.1. Kendala Tingkat Kepolisian Polres Temanggung	301
4.2.3.2. Kendala Tingkat Kejaksaan Negeri Temanggung.....	315
4.2.3.3. Kendala Tingkat Pengadilan Negeri Temanggung.....	324
4.2.4. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris.....	335
4.2.5. Perbandingan dengan Negara Lain	341
4.2.5.1. Perbandingan dengan di Negara Belanda.....	341
4.2.5.2. Perbandingan dengan Negara Jepang	346
4.2.5.3. Perbandingan Negara Skotlandia.....	355
4.2.5.4. Aspek Perlindungan Hukum.....	369
4.2.5.5. Aspek Kepastian Hukum dalam Pidanaan.....	372
4.2.5.6. Aspek Keadilan.....	374
4.3. Pengaturan Hukum Yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan di Masa Mendatang	376
4.3.1. Konsep Pengaturan Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat.....	378
4.3.2. Konsep Diversi sebagai Model Peraturan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan dalam Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.....	387

4.3.3. Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.....	394
4.3.3.1. Redefinisi Nilai.....	405
4.3.3.2. Reformulasi Norma	410
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	421
5.1. Kesimpulan.....	421
5.2. Saran.....	425
DAFTAR PUSTAKA.....	428
Lampiran	435



Lampiran



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA
Jl. Poros Maros - Soppeng, Pattiro Deceng, Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90562

Camba, 11 Juli 2023

Nomor : B-169/P.4.16.8/Cp.1/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Permohonan izin Wawancara

Yth.
Universitas Pelita Harapan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Universitas Pelita Harapan Nomor 171/DH-PPS-UPH/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Wawancara. Dengan ini kami sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kami menerima permohonan izin melakukan wawancara serta memperoleh data dan informasi terkait dengan topik disertasi yang ditulisnya.

Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maros
Di Camba



ANDI BASO SULOLIPU AMIR, S.H
Jaksa Muda NIP.19860311 200912 1 002





PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS IB

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 58 Maros Sulawesi Selatan

☎ 0411-371317 - 📠 0411-371317 - 📠 90512

📘 Pengadilan Negeri Maros - 📷 pn_maros - 📺 PNMaros

Website : www.pn-maros.go.id Email : pengadilannegerimaros@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1212/SK/HK/VII/2023/PN Mrs

Kami Ketua Pengadilan Negeri Maros menerangkan bahwa :

Nama : **ABDURRACHMAN ALHAKIM**
NPM : 01657210009
Program Study : Doktor Ilmu Hukum
Universitas Pelita Harapan

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Maros dengan metode Wawancara Via Online pada tanggal 6 Juli 2023, untuk penulisan Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum dengan judul "*Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penyelesaian Diversi Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Bermartabat*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 13 Juli 2023

Ketua Pengadilan Negeri Maros,


KHAIRUL S.H., M.H.
NIP. 19791113 200212 1 003

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR MAROS

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Maros 90511

Makassar, 17 Juli 2023

Nomor : B/ 215 /VII/2023/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Data kasus anak di Kab. Maros
Tahun 2020 s.d 2023

Kepada

Yth. KETUA PROGRAM STUDI
DOKTORAL ILMU HUKUM UNIV.
PELITA HARAPAN
Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo
Budi, S.H., LL.M

Di

Jakarta

1. Rujukan :
 - a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Bapak Abdurrahman Alhakim Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Pelita Harapan Jakarta, yang bermohon untuk melakukan Wawancara dan memperoleh data informasi terkait judul Disertasi "Penerapan kebijakan hukum Pidana dalam upaya penyelesaian Diversi Pidana Anak berdasarkan Keadilan bermartabat".
3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan hormat kami dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Maros menyampaikan bahwa Bapak Abdurrahman Alhakim NPM 01657210009 telah melakukan wawancara dengan kami Unit PPA Sat Reskrim Polres Maros yang dalam hal ini diwakili oleh Kaniit PPA IPDA Kori Sulle Tandipayung S.Sos;
4. Adapun mengenai Data Kasus Anak yang kami tangani di Unit PPA Sat Reskrim Polres Maros sesuai dengan Laporan Polisi dari Masyarakat yang kami terima dari Tahun 2020 s.d bulan Juli Tahun 2023 terlampir;
5. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAROS
KASAT RESKRIM
SELAKU PENYIDIK

SLAMET RAHARDJO S.H., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82030629



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEMANGGUNG

Jalan Suwandi - Suwardi Temanggung 56229

Temanggung, 12 Juli 2023

Nomor : B/152/VI/Res. 1.24./2023/Satreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan pelaksanaan wawancara oleh mahasiswa

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

di

Jakarta

u.p. Kaprodi Doktor Ilmu Hukum

1. Rujukan :
 - a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan nomor : 192/DH-PPS-UPH/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Wawancara Mahasiswa Program Studi Hukum, Program Doktor Universitas Pelita Harapan Jakarta di Satreskrim Polres Temanggung.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini diberitahukan kepada Ka. bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib telah dilakukan wawancara oleh mahasiswa Universitas Pelita Harapan Jakarta atas nama ABDURRAKHMAN ALHAKIM NPM 01657210009 kepada AIPDA PUJI ASTUTI NRP 81101121 Jabatan Anggota Unit Idik IV/ PPA Satreskrim Polres Temanggung tentang data tindak pidana dengan pelaku anak dari tahun 2019 s.d. 2023 yang terjadi di wilayah hukum Polres Temanggung.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG
SATRESKRIM



Tembusan :

1. Kapolres Temanggung.
2. Kabag SDM Polres Temanggung.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG

Jl. Letjen R. Suprpto No. 40, Temanggung

"UNTUK KEADILAN"

Nomor : B-309/M.3.37.3/02/2023 28 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Wawancara

Yth. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan

Di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 083/DH-PPS-UPH/II/2023 Tanggal 15
Februari 2023 Hal Permohonan Izin Wawancara Mahasiswa,

Nama : Abdurrahman Alhakim
NPM : 01657210009
Judul Disertasi : Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya
Penyelesaian Diversi Pidana Anak Berdasarkan
Keadilan Bermartabat

bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan mahasiswa dimaksud
untuk melaksanakan Wawancara dengan ketentuan wajib mentaati tata tertib yang berlaku
dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Temanggung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih .

Jaksa Fungsional
Kejaksaan Negeri Temanggung .


Wana Diah Andini, S.H.,M.H.

NIP 198505062008122001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
Jln. Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125
Telepon (0771) 7333083, Faksimili (0771) 7333083
Laman : kepri.kemenkumham.go.id, Surel : kanwil.kepri@kemenkumham.go.id

Nomor : W.32.UM.01.01-2104 28 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Wawancara

Yth. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan

Di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 082/DH-PPS-UPH/III/2023 Tanggal 15 Februari 2023 Hal Permohonan Izin Wawancara mahasiswa,

Nama : Abdurrahman Alhakim

NPM : 01657210009

Judul Disertasi : Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Upaya Penyelesaian Diversi Pidana Anak
Berdasarkan Keadilan Bermartabat

bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan Wawancara dengan ketentuan wajib mentaati tata tertib yang berlaku dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pih. Kepala Kantor Wilayah,



Dwinastiti H
NIP 196812061991032001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
2. Kepala Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam;
3. Mahasiswa Bersangkutan



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
KEJAKSAAN NEGERI BATAM**

Jalan Engku Putri Batam Center, Telp (0778) 461292, Fax. (0778) 461797

Batam, 24 Juli 2023

Nomor : B-2886/L.10.11/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Wawancara

Yth. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan

Di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 110/DH-PPS-UPH/III/2023 Tanggal 28
Maret 2023 Hal Permohonan Izin Wawancara Mahasiswa,

Nama : Abdurrahman Alhakim
NPM : 01657210009
Judul Disertasi : Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya
Penyelesaian Diversi Pidana Anak Berdasarkan
Keadilan Bermartabat

Sehubungan dengan rujukan surat tersebut diatas,bersama ini disampaikan bahwa saudara
Abdurrahman Alhakim dengan NPM 01657210009 dimaksud telah melaksanakan Wawancara
dengan kami Kejaksaan Negeri Batam yang di wakili oleh Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi
dalam hal ini diwakili oleh bapak Karya So Immanuel Gort, S.H.,M.H. berkoordinasi dengan
Kejaksaan Negeri Batam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih .

Kasubsi Penuntutan, Eksekusi & Eksaminasi
Kejaksaan Negeri Batam



Karya So Immanuel Gort . S.H.,M.H.
NIP. 198707162014031001



PENGADILAN NEGERI BATAM KELAS IA

Jl. Engku Haji Tua Batam Center Kota Batam

Telephone : (0778) 468828 Fax : (0778) 468828

Website : www.pn-batam.go.id

Email : pnbatam.info@gmail.com

Batam, 10 April 2023

Nomor : W32.U2/1157/KP.01.10/4/2023.
Lampiran : -
Penhal : **Persetujuan Izin Wawancara dan
Pengambilan Data di Pengadilan
Negeri Batam.**

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Universitas Pelita Harapan
Di -
Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 112/DH-PPS-UPH/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, penhal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan menerima mahasiswa Universitas Pelita Harapan atas nama : **ABDURRAKHMAN ALHAKIM** untuk melakukan Wawancara dan Pengambilan Data di tempat kami.

Demikian kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BATAM,



RAHMAWIRNA, S.T
NIP. 19750302 200604 2 002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA BARELANG
Jalan Jendral Sudirman 4, Batam 29462



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : S-KET / 32 / V / 2023 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang menerangkan bahwa :

Nama : ABDURRAKHMAN ALHAKIM
NPM : 01657210009
Program Studi : SOSIOLOGI
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Judul Disertasi : "PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYELESAIAN DIVERSI PIDANA ANAK BERDASARKAN KEADILAN BERMARTABAT"

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Batam, 03 Mei 2023
An. KASAT RESKRIM POLRESTA BARELANG
WAKA

AJUN KOMARIS POLISI NRP 68040458



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM
 Jl. Jenderal Sudirman No. 03 Sei Baloi - Batam
 Telp : (0778) 457734 Email : lapasanakbatam@gmail.com

No	Nama	Uslah	Jenis Kelamin	Lama Pidana (tahun)	Lama Pidana (bulan)	Lama Pidana (hari)	Jenis Kejahatan	Tanggal Mulai Ditahan	Residivis Ke
1	Mikail Aditya Saputra BIN Darma Saputra	14	Laki-laki	0	0	10	Perlindungan Anak	2023-01-14	0
2	Gabriel Gunawan Deni BIN Antonius Dene	14	Laki-laki	2	10	0	Perlindungan Anak	2022-09-20	0
3	Putra BIN Ed	15	Laki-laki	3	6	0	Perlindungan Anak	2022-08-29	0
4	Paulinus Oktavianus Saputra BIN Kalibus Kalimas	15	Laki-laki	1	9	0	Perlindungan Anak	2022-10-16	0
5	Paulus Revand Putra Jaya Fau BIN Jhon Martinus	15	Laki-laki	0	0	30	Pencurian	2022-10-21	0
6	Dewan Palmevi BIN Muhammad Wahid	15	Laki-laki	0	8	0	Pencurian	2021-11-19	0
7	Yael Wilson BIN Hascholan Marnungs	15	Laki-laki	2	0	0	Perlindungan Anak	2023-01-13	0
8	Albar Mahesa Putra BIN Zumi	15	Laki-laki	1	4	0	Pencurian	2022-07-23	1
9	Duta Triatmaja BIN Irawansyah	16	Laki-laki	0	0	30	Perlindungan Anak	2022-12-12	0
10	Nobel Sanjaya Sahaan BIN Riduan Saaban	16	Laki-laki	1	3	0	Pencurian	2023-09-30	1
11	Muhammad Rizki Halik Zakari Rahmani BIN Muhammad Anofis	16	Laki-laki	2	0	0	Perlindungan Anak	2023-08-09	0
12	Arlisan Daeng Marewa BIN Muslim	16	Laki-laki	1	3	0	Pencurian	2022-09-21	2
13	Franco Diaz Himgael BIN Jimi Hutagaol	16	Laki-laki	0	10	0	Pencurian	2022-03-27	2
14	Arifa BIN Tamil	16	Laki-laki	1	7	0	Perlindungan Anak	2022-09-14	0
15	Perisudko Sihombing BIN Onasis Sihombing	16	Laki-laki	2	0	0	Perlindungan Anak	2023-01-13	0
16	Muhamad Fathir Akram Arayan BIN Rudy	16	Laki-laki	3	0	0	Perlindungan Anak	2022-07-23	0
17	Muhammad Irfandi Nasution BIN Irawansyah Putra Nasution (Alm.)	16	Laki-laki	1	0	0	Pencurian	2022-10-10	1
18	Irwan Wazma BIN Yulius Wazma	16	Laki-laki	2	0	0	Penganiayaan	2021-10-14	0
19	Arsoho Bini Iskandar	16	Laki-laki	0	10	0	Pencurian	2022-10-20	0
20	Ariel Ibram Putra BIN Aeri Arsyad	16	Laki-laki	1	5	0	Pencurian	2022-10-07	1
21	Christian Yoseph Wai Idan BIN Alyous Idan	16	Laki-laki	2	6	0	Perlindungan Anak	2022-06-03	0
22	M.Fazri BIN Muhammad Faizar	16	Laki-laki	0	0	30	Pencurian	2022-10-25	0
23	Muhammad Syahrul BIN Hoorikal	16	Laki-laki	0	10	0	Pencurian	2021-12-07	0
24	Louis Nardolan BIN Asan	16	Laki-laki	2	0	0	Perlindungan Anak	2022-10-25	0
25	Muhammad Rizki Almansyah BIN Andika	16	Laki-laki	0	0	10	Pencurian	2023-02-10	1
26	Maulana BIN	16	Laki-laki	0	8	0	Pencurian	2022-05-21	0
27	Varel Abdillah Wardana BIN Indra Gunawan	17	Laki-laki	1	0	0	Pencurian	2022-10-27	1
28	Nikolao Jeprian BIN Yohanes Ima	17	Laki-laki	2	0	0	Perlindungan Anak	2022-08-06	0
29	Suryanto BIN Amirudin idad	17	Laki-laki	2	6	0	Perlindungan Anak	2022-06-24	0
30	Muhammad Sahputra BIN Udin (Alm.)	17	Laki-laki	1	6	0	Pencurian	2022-11-20	0
31	Aditya Rahman BIN Aryanto	17	Laki-laki	2	0	0	Perlindungan Anak	2022-10-11	0
32	Dwi Abandi Lubis BIN Pangalson Lubis	17	Laki-laki	0	0	30	Pencurian	2022-10-21	0
33	Steven Dionis BIN Mex	17	Laki-laki	0	0	10	Pencurian	2022-01-11	0
34	Kukuh Prabowo BIN Nuryanto	17	Laki-laki	1	4	0	Penggelapan	2022-06-25	1
35	Vobel Benka Simanjuntak BIN Eben Ezer	17	Laki-laki	1	6	0	Pencurian	2022-10-14	3
36	Muti Gunawan BIN Andi Satria Syaputra (Alm.)	17	Laki-laki	0	0	30	Pencurian	2022-11-11	0

37	Ronaki Kelvin Sirait BIN Idris	17	Laki-laki	0	0	10	Pencurian	2023-02-07	0
38	Dharsi Pardiyanisah BIN Jamaris	17	Laki-laki	1	6	0	Pencurian	2022-10-15	2
39	Muhammad Andrey Alvito BIN Muhammad Rafi Alven Saf	17	Laki-laki	2	6	0	Perlindungan Anak	2022-08-23	0
40	Heirolloh Saputra BIN Syafroedin	17	Laki-laki	4			Pencurian	2021-10-14	0
41	Aneqa Sulistyio GIN Pamsjento	17	Laki-laki	7	3	0	Perlindungan Anak	2022-06-02	0
42	Al Multi BIN Trubus	17	Laki-laki	0	9	0	Pencurian	2022-08-15	0
43	Farhas BIN Bachter daud	17	Laki-laki	4	0	0	Merketika	2022-05-11	0
44	Dupit Siagian BIN Gamardin Siagian	17	Laki-laki		10		Pencurian	2022-02-05	0
45	Haikel Christian Simanungkalit BIN Saad Simanungkalit	17	Laki-laki	1	0	0	Pencurian	2022-11-01	1
46	Yoga Prasetyo BIN Yoyok Subandoyok (Alm)	18	Laki-laki	1	6	0	Pencurian	2022-10-15	1
47	Palentho Simanjuntak	18	Laki-laki	0	10	0	Pencurian	2022-09-22	0
48	Muhammad Mudi BIN Iase	18	Laki-laki	3	6	0	Perlindungan Anak	2022-06-26	0
49	Daniel Putra Halomoan Situmeang GIN Dedy Situmeang	18	Laki-laki	0	11	0	Pencurian	2021-11-11	1
50	Muhammad Fajar Abdul Aziz BIN Sugianto	18	Laki-laki	3	0	0	Narikotika	2022-10-25	0
51	Wilson Risky BIN Djoni Trison	18	Laki-laki	1	0	0	Pencurian	2022-09-25	0
52	Mahendra Arya Nugraha BIN Surya Susanto	18	Laki-laki	1	0	0	Perlindungan Anak	2022-10-26	0
53	Dimas Dianto BIN Abdiurrahman	18	Laki-laki	2	0	0	Perlindungan Anak	2022-05-29	0
54	Reno Oktavian BIN Refriedi (Alm)	18	Laki-laki	2	6	0	Perlindungan Anak	2022-09-29	0
55	Prima Rahmat Hariadi BIN Darsi Hariyadi	18	Laki-laki	5	0	0	Perlindungan Anak	2022-10-06	0
56	Raja Muhammad Ardiansyah BIN Raja Nurdin	18	Laki-laki	2	6	0	Perlindungan Anak	2022-10-29	0



PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 180
Telepon 0293 – 491344 Faximile 0293 – 491344
Email : pn.temanggung@gmail.com, Website : pn-temanggung.go.id
TEMANGGUNG – JAWA TENGAH 56218

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W12.U27/ 910 /HK.01.01/8/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh. Panitera Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Abdurrahman Alhakim
NPM : 01657210009
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Universitas Pelita Harapan


Berdasarkan Surat dari Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Nomor 191/DH-PPS-UPH/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Wawancara.

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB dengan Judul Penulisan Disertasi "**PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYELESAIAN DIVERSI PIDANA ANAK BERDASARKAN KEADILAN BERMARTABAT**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 7 Agustus 2023

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B

Plh. Panitera

AGUS DWI WIRAWAN, S.H.

NIP : 19670809 199303 1 001



PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB
Jalan Jenderal Sudirman No. 180 Telepon (0298) 491344-491114
No.Fax : (0293) 491344 ext; 23, Email : pn.temanggung@gmail.com
TEMANGGUNG 56218

Nomor : W12.U27/ 914 /HK.01.01/8/2023 Temanggung, 7 Agustus 2023
Lampiran : - Kepada :
Perihal : Balasan Permohonan Data Yth. Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Hukum
di-
UNIV. PELITA HARAPAN

Dengan hormat,

Menjawab Surat Permohonan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Nomor 219/DH-PPS-UPH/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, dengan ini kami menyampaikan data pendukung dalam rangka penulisan Disertasi berjudul "PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYELESAIAN DIVERSI PIDANA ANAK BERDASARKAN KEADILAN BERMARTABAT" sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kasus	Klasifikasi Perkara
1.	2020	2 kasus	Pencurian
		2 kasus	Narkotika
		2 kasus	Tindak Pidana Senjata Api dan Benda Tajam
		1 kasus	Perlindungan Anak
2.	2021	3 kasus	Perlindungan Anak
		1 kasus	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat
		3 kasus	Pencurian
3.	2022	1 kasus	Pencurian
		1 kasus	Pembunuhan
4.	2023	1 kasus	Pencurian
		1 kasus	Perlindungan Anak
		1 kasus	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Abdurrakhman Alhakim, S.H., M.H.
2	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyumas, 31 Maret 1995
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	3302223103950002
4	NIDN	1031039501
5	E-mail	Abdurrakhmanalhakim31@gmail.com
6	Nomor Telepon/ HP	085842636108
7	Alamat Kantor	Universitas Internasional Batam, Jalan Gajah Mada Baloi, Sei Ladi, Batam
8	Alamat Rumah	Perumahan Summercoast blok C-3 no 17, Batam Kepulauan Riau

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Pelita Harapan
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Pembaharuan Hukum Pidana	Doktoral Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2014-2018	2018-2020	2021-2024

C. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
----	----------------------	-------------	------------------------

1.	Integral Approach To Cultural Reform: An Indonesian Criminal Justice System	Legal Spirit	Magister Hukum Universitas Widyagama, Malang, 2022.
2.	Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnal dari Resiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro	Volume 4 Number 1, 31 Januari 2022
3.	Analisis Hukum Catcalling dan Pemenuhan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal	Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , Universitas Pendidikan Ganesha	Volume 9, Nomor 3, 11 Oktober 2021
4.	Criminal Control for the Distribution of Pornographic Content on the Internet: An Indonesian Experience	Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha	Volume 7, Nomor 2, 23 September 2021
5.	Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , Universitas Pendidikan Ganesha	Volume 9, Nomor 1, 28 Februari 2021
6.	Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro	Volume 1, Nomor 3,24 September 2019

7.	Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Dibawah Umur Yang Ada Di Indonesia	Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora	Volume 9, Nomo 1, 28 Januari 2022
8.	Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana	Jurnal Komunitas Yustitia	Volume 4, Nomor 3, 19 Januari 2022
9.	Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia	Jurnal Komunitas Yustitia	Volume 4, Nomor 3, 1 November 2022
10.	The Ideas Of Rechterlijk Pardon As A Restorative Justice Approach: From Vengeance To Recovery?	Ganesha Law Review	Volume 5, Nomor 1, 1 Mei Tahun 2023
11.	Revitalizing Justice: Empowering Juvenile Sexual Offenders through a Restorative Approach in Indonesia	Journal Of Judicial Review	Volume 25, Nomor 1, 1 Juni 2023

G. Seminar dan pelatihan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Kegiatan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
----	----------	-------------------------------	-------

1.	Sosialisasi dan Sinkronisasi Aturan "Dalam rangka Implementasi dan Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja dan Turunannya".	Kementerian Sekretariat Negara RI	2022
2.	Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti)	Universitas Negeri Makassar	2022
3.	The 2 nd Conference on Community Engagement Project with Theme Community Service to Support Sustainable Development Goals in the Post-Covid-19 Pandemic	Universitas Internasional Batam	2022
4.	Certified Perancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	LSP Justitia	2022
5.	Certified Mediator	LSP Justitia	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 18 Mei 2024



Abdurrahman Alhakim,
SH., MH.